

PERJALANAN DAN ARGUMENTASI SNI

Merajut Indonesia melalui Digitalisasi Aksara Nusantara (MIMDAN) merupakan program PANDI yang beberapa kegiatannya bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta didukung oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) untuk setiap program Merajut Indonesia.

Upaya PANDI menyelenggarakan digitalisasi aksara nusantara dilakukan sebagai salah satu upaya revitalisasi bahasa daerah. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan melindungi bahasa daerah dari kepunahan

Salah satu visi PANDI dalam program ini adalah “Menjadikan domain .ID sebagai domain pilihan utama di tingkat Nasional dan Internasional”. IDN (Internationalized Domain Name) merupakan nama domain yang mengandung paling sedikit satu label dalam tiap tampilannya pada aplikasi perangkat lunak, seluruhnya dalam bahasa atau aksara khusus. Oleh karena itu, diperlukan beberapa sub-program yang mendukung program MIMDAN.

Sidang Komisi III tentang Digitalisasi Aksara Nusantara pada Kongres Aksara Jawa yang diadakan tanggal 22 – 26 Maret 2021, menghasilkan beberapa keputusan:

1. Menetapkan dan memutuskan standardisasi fon aksara Jawa.
2. Menetapkan dan memutuskan standardisasi tata letak papan tombol aksara Jawa.
3. Mengajukan standardisasi fon aksara Jawa dan standardisasi tata letak papan tombol aksara Jawa kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

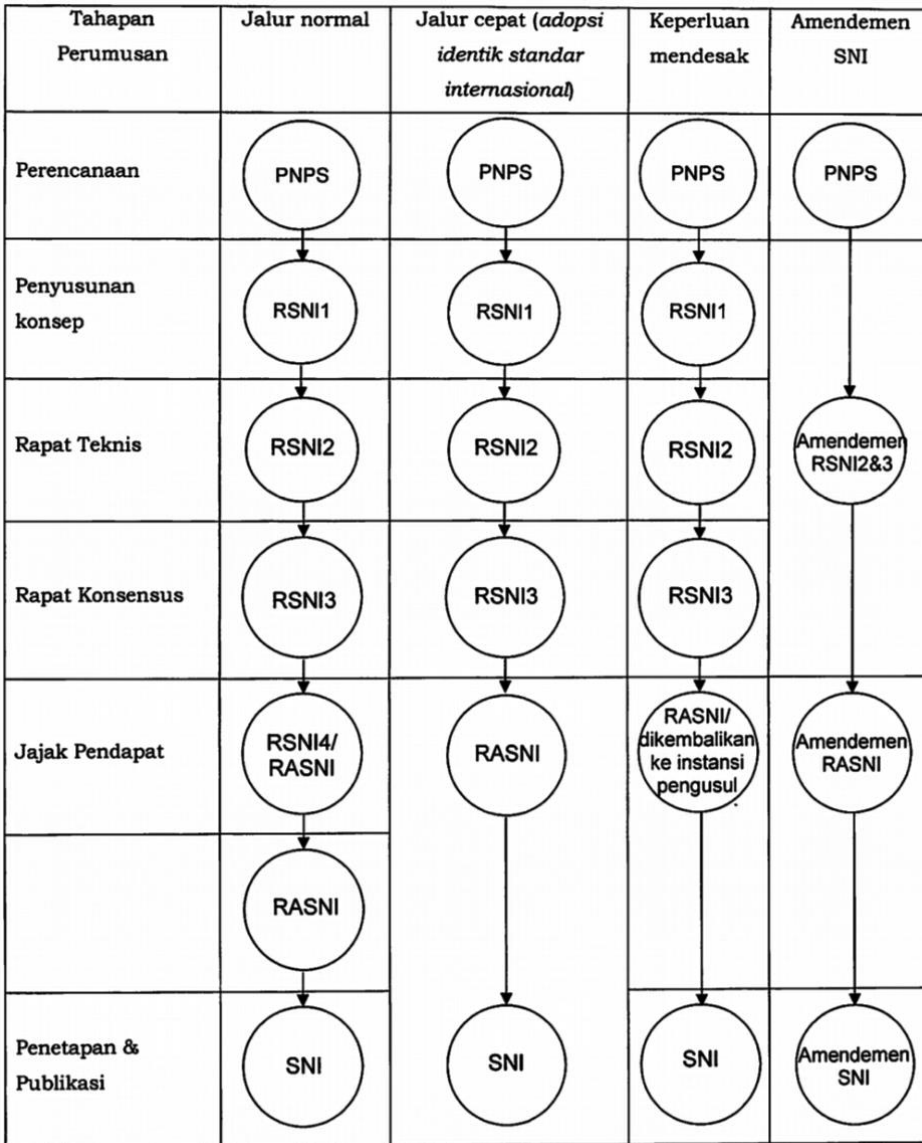
Sebagai tindak lanjut hasil keputusan Komisi III maka diadakan perbincangan bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tanggal 1 April 2021. Tema yang

diangkat dalam perbincangan tersebut adalah bagaimana *journey* selanjutnya untuk menanggapi hasil Kongres Aksara Jawa.

Hasil perbincangan dengan BSN tersebut memberikan wawasan untuk tindakan ke depan, yaitu pembuatan SNI untuk transliterasi, fon dan papan ketik untuk mempermudah dan mengusung ISO 10646 selanjutnya. BSN memberikan contoh proposal yang harus dirumuskan oleh tim Kongres Aksara Jawa. Menurut BSN, ada identifikasi kebutuhan SNI pada transliterasi yang masuk pada Komtek 01-05, sedangkan layout papan ketik multilingual masuk ke Komtek 35-02. Untuk *journey*-nya yaitu perumusan SNI, penetapan SNI, dan publikasi SNI.

Adapun masing-masing tahapannya memerlukan waktu :

1. Usulan program, penyusunan konsep RSNi *timeline*-nya selama 6 bulan.
2. RSNi 1 dibahas dalam waktu 3 bulan.
3. RSNi 2 dibahas dalam waktu 3 bulan.
4. RSNi 3 Jajak pendapat 2 bulan, perpanjangan 1 bulan
5. RSNi 4 Penyelesaian maksimal 2 bulan.
6. RSNi 4 Pemungutan suara maksimal 3 bulan.
7. Saat sudah RASNi penetapan menjadi SNI 1 bulan.
8. Publikasi 1 bulan.



Pada tanggal 21 April 2021 PANDI mengadakan diskusi pembuatan SNI fon dan papan ketik aksara Jawa bersama SDPPI-KOMINFO dan BSN serta tim KAJ. Ini supaya aksara nusantara bisa masuk ke dalam perindustrian elektronik. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Mei 2021 PANDI mengadakan rapat teknis dan kaji ulang Dokumen RSNI dan NWIP Aksara Jawa yang bersama BSN dan KEMENPERIN.

Setelah itu terdapat perubahan untuk pembuatan konsep dokumen RSNI1 dan Tim Kongres Aksara Jawa melakukan perubahan tersebut. Dokumen hasil akhir sudah diserahkan kepada tim PANDI pada tanggal 16 Juni 2021 dan selanjutnya diteruskan ke BSN. Setelah itu, BSN mulai memberikan referensi agar dapat diaplikasikan pada ranah

digital serta pembelajaran di masyarakat luas. Salah satunya adalah mengirimkan usulan kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sesuai dengan arahan dari BSN sebagai “usulan mendesak” sehingga dapat diproses lebih cepat daripada jalur biasa.

Tanggal 16 Juli 2021, tim PANDI melakukan koordinasi daring dengan mengundang tim Kongres Aksara Jawa, Konsultan Aksara, Konsultan hukum PANDI serta Tim Perumus FGD Aksara Sunda. Hasil dari pertemuan daring tersebut adalah pembuatan *general input* untuk SNI seperti ISO 10646. Melalui *general input* tersebut akan menjadi satu nomor SNI untuk satu standar font yang memuat berbagai aksara nusantara, satu nomor SNI untuk standar *keyboard* yang memuat berbagai aksara nusantara dan satu nomor SNI untuk transliterasi standar yang memuat berbagai aksara nusantara.

SNI transliterasi akan ditangguhkan dulu karena untuk *general input* memerlukan perbincangan dan kesepakatan dari masing-masing pegiat aksara. Sementara proses SNI berjalan, kita juga mungkin bisa beralih lagi pada produk digitalisasi lain yang lebih aplikatif bagi penggunaan di masyarakat. Misalnya penyediaan konversi untuk aksara-aksara yang telah masuk UNICODE—ini sudah dirancang di website MIMDAN. Semestinya ini juga menunggu hasil standardisasi (SNI/ISO), tapi jadwal proses SNI transliterasi cukup panjang dan tidak bisa disegerakan karena diperlukan riset lebih mendalam yang melibatkan para ahli dalam bidang filologi dan epigrafi, serta melibatkan LIPI untuk merumuskan transliterasi *general* aksara nusantara. Mungkin ini salah satu tantangan, tapi tetap harus maju dan diteruskan untuk melancarkan tahapan digitalisasi selanjutnya.

Untuk mempercepat proses SNI, pengakuan formal pemerintah menjadi landasan utama. Akan tetapi terkadang pemerintah tidak mempunyai bagian khusus yang fokus mengurus program aksara daerah, termasuk pengakuan Pemda terhadap aksara lokalnya. Menurut pengamatan BSN bukan hanya diperlukan sebuah aturan, tapi aksara daerah diterapkan juga pada laman web pemerintah daerah, program-program yang diadakan pemerintah setempat, festival atau acara adat yang masih menggunakan aksara daerah, dan ini bisa jadi salah satu landasan usulan mendesak untuk KEMENPERIN.

Pada rencana awal SNI fon, papan ketik dan transliterasi akan dibuat untuk masing-masing aksara daerah. Namun dari hasil perbincangan terakhir tanggal 16 Juli 2021, menurut BSN itu kurang efisien. Nantinya akan terlalu banyak nomor SNI; untuk satu aksara saja ada 3 nomor SNI yaitu font, papan ketik, dan transliterasi. Jika dua aksara, akan ada 6 SNI, demikian kelipatannya. Padahal struktur isi dari masing-masing aksara tersebut hampir sama. Oleh karena itu, *general input* menjadi solusinya. Selain lebih efektif, ini juga sesuai dengan misi program Merajut Indonesia.

Keputusan dan hasil diskusi terakhir masih menunggu hasil analisa dari proposal yang diajukan ke KEMENPERIN. Apabila ada yang harus diperbaiki maka segera diadakan pembahasan, termasuk dokumen SNI yang sudah diajukan ke KEMENPERIN dengan ke BSN dan KEMENKO PMK.

Hasil perbincangan bersama tersebut sudah dilaporkan kepada KEMENKO PMK, dan setelah diamati, ternyata ini termasuk ke dalam PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PP4 yaitu arah dan kebijakan KEMENKO PMK. Karena itu, ini dapat membantu pengusulan SNI apabila terdapat pada program kerja. Menurut KEMENKO PMK dan BSN, untuk papan ketik tercakup akan masuk ke KP3 (Pengembangan budaya lptek, Inovasi, Kreativitas dan daya cipta), sedangkan fon dan transliterasi akan masuk ke KP2 (Pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara daerah serta sastra).

Kesimpulan:

- **Perubahan dari hasil perbincangan terakhir mengenai SNI, yang sebelumnya direncanakan untuk membuat tiga SNI untuk masing-masing aksara, selanjutnya akan dibuat draft PNPS yang terbaru apabila dibutuhkan.**
- **Untuk saat ini akan segera menanyakan informasi selanjutnya ke PIC KEMENPERIN.**